

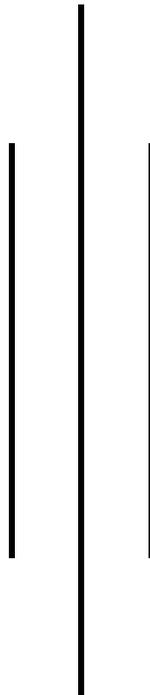


**Kementerian  
Perindustrian**  
REPUBLIC INDONESIA

**LAPORAN PENGENDALIAN  
DAN EVALUASI  
PELAKSANAAN RENCANA  
PEMBANGUNAN  
INSPEKTORAT I  
TAHUN 2021**

INSPEKTORAT I  
INSPEKTORAT JENDERAL  
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN  
JAKARTA, 8 APRIL 2021

**LAPORAN RENCANA DAN CAPAIAN KEGIATAN  
INSPEKTORAT I  
TRIWULAN II  
TAHUN 2021**



**INSPEKTORAT JENDERAL  
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN  
JAKARTA, 1 Juli 2021**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat-Nya Inspektorat I dapat menyelesaikan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Periode Triwulan II Tahun Anggaran 2021.

Dasar hukum penyusunan laporan ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 mengenai Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Laporan ini dibuat untuk melihat besaran sasaran keuangan dan fisik yang telah dicapai dalam pelaksanaan program kegiatan di lingkungan Inspektorat I Kementerian Perindustrian selama Triwulan II Tahun 2021.

Laporan ini merupakan pertanggungjawaban Inspektorat I atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya membantu Inspektorat Jenderal dalam menyelenggarakan pemerintahan di bidang pengawasan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian.

Melalui laporan ini, kami berharap dapat memberikan gambaran obyektif tentang capaian kinerja Inspektorat I periode Triwulan II Tahun 2021. Laporan ini diharapkan juga dapat menjadi acuan dalam merencanakan, melaksanakan pada periode berikutnya.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini, kami sampaikan terima kasih. Semoga laporan ini bermanfaat.

Jakarta, 1 Juli 2021

Inspektur I



Wulan Aprilianti Permatasari

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b>	i
<b>KATA PENGANTAR</b>	ii
<b>DAFTAR ISI</b>	iii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
A. Tugas Pokok dan Fungsi	1
B. Latar Belakang Kegiatan/Program	2
C. Struktur Organisasi	3
<b>BAB II : RENCANA PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>5</b>
A. Program/Kegiatan Tahun 2021	5
B. Sasaran Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan	8
<b>BAB III : PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>12</b>
A. Hasil yang Telah Dicapai	12
B. Analisis Capaian Kinerja	18
C. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan	21
D. Langkah Tindak Lanjut	22
<b>BAB IV : PENUTUP</b>	<b>23</b>
A. Kesimpulan	23
B. Saran	23
<b>LAMPIRAN : LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TRIWULAN II INSPEKTORAT I TAHUN ANGGARAN 2021</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Tugas Pokok dan Fungsi**

Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian sebagai unit kerja pengawasan internal memiliki peran mendorong pencapaian tujuan dan efektifitas pelaksanaan tugas-tugas organisasi serta mencegah terjadinya penyimpangan, pemborosan, dan penyelewengan dari unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri, serta penyusunan laporan hasil pengawasan Sekretariat Jenderal, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri, dan unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri.

Adapun cakupan satuan kerja Inspektorat I terdiri dari 2 unit kerja pusat yaitu Sekretariat Jenderal dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) dengan 28 satuan kerja vertikal di lingkungan yaitu 9 satuan kerja SMK, 12. satuan kerja Politeknik dan 7 satuan kerja Balai Diklat Industri

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat I menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan rencana dan program pengawasan intern;
2. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

3. pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
4. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
5. pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan, tata usaha, dan rumah tangga inspektorat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 52 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Pengawasan Internal di lingkungan Kementerian Perindustrian, dalam pelaksanaan Pengawasan Internal, Inspektorat I bertanggungjawab pada cakupan tugasnya untuk:

1. Melaksanakan kegiatan asuransi dan memberikan pendapat atas pelaksanaan tugas dan fungsi unit eselon I serta penerapan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian internal;
2. Memberikan konsultasi dan asistensi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi unit eselon I serta penerapan tata kelola manajemen risiko dan pengendalian internal baik atas pertimbangan professional maupun atas permintaan eselon I;
3. Melaksanakan pendampingan terhadap unit eselon I yang dilakukan pemeriksaan oleh BPK dan BPKP, baik atas pertimbangan professional maupun atas permintaan unit eselon I;
4. Melaksanakan pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan wewenang oleh pegawai/pejabat di lingkungan Kementerian Perindustrian.

## B. Latar Belakang Kegiatan/Program

Agar fungsi pengawasan tersebut dapat terselenggara dengan baik, telah disusun program kegiatan tahun 2021 dengan didasarkan pada arah dan kebijakan pelaksanaan kegiatan yang akan ditempuh.

Pelaksanaan kegiatan/program dilatarbelakangi oleh kebijakan pelaksanaan kegiatan Inspektorat Jenderal dalam tahun 2021 adalah :

1. Optimalisasi peran pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dengan berbasis pada pembinaan, dimana Inspektorat Jenderal tidak hanya melaksanakan fungsi pemeriksaan, tetapi juga sebagai *Counseling Partner* (Mitra Kerja).
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pengawasan yang cerdas dan profesional sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.
3. Penyempurnaan sistem dan prosedur dalam pengawasan dalam upaya mewujudkan ketaatan, ketertiban, efisiensi, efektivitas dan ekonomis dalam pelaksanaan tugas.

Sedangkan kebijakan pelaksanaan kegiatan yang akan diselenggarakan sebagai berikut :

1. Melaksanakan pengawasan berbasis kinerja mengedepankan aspek pembinaan kepada seluruh satuan kerja dalam rangka menjamin tercapainya program dan sasaran kinerja audit;
2. Meningkatkan peran pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan program dan anggaran, pembinaan serta pengembangan industri;
3. Mewujudkan sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel;
4. Meningkatkan profesional aparat pengawasan;
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana;
6. Meningkatkan koordinasi internal dan eksternal;
7. Menerapkan audit berbasis resiko.

### **C. Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Inspektorat I terdiri dari :

#### **1. Subbagian Tata Usaha**

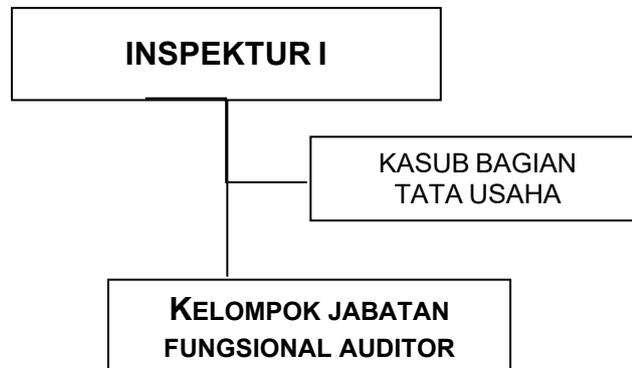
Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh pejabat eselon IV yang mempunyai tugas melakukan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan, tata usaha, dan rumah tangga inspektorat..

#### **2. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.**

Kelompok jabatan fungsional auditor mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional auditor masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok jabatan fungsional auditor terdiri dari sejumlah jabatan fungsional auditor yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

Masing-masing kelompok jabatan fungsional auditor dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional auditor senior yang ditunjuk oleh Inspektur

Bagan Struktur Organisasi Inspektorat I Kementerian Perindustrian sebagai berikut:



Bagan struktur organisasi Inspektorat I terdiri dari

1. Inspektur I

2. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh pejabat eselon IV yang mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha, dan rumah tangga Inspektorat I.

3. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Kelompok jabatan fungsional auditor mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional auditor masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jumlah auditor pada Inspektorat I sebanyak 15 orang terdiri dari:

a. Auditor Utama : 1 orang;

b. Auditor Madya : 1 orang;

c. Auditor Muda : 6 orang;

d. Auditor Pratama : 7 orang.

## BAB II

### RENCANA PROGRAM/KEGIATAN

#### A. Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2021

Program Inspektorat Jenderal adalah "Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian", dan kegiatan Inspektorat I adalah **Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, Dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat I** dengan kegiatan kerja pada Tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 1. Layanan Pengawasan Internal Inspektorat I Tahun 2021

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	KET
1.	Audit Program Prioritas Dan Program Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I	4 Laporan	
2.	Reviu Laporan Keuangan/bmn Dan Penganggaran Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I	121 Laporan	
3.	Monitoring Dan Evaluasi Tata Kelola Dan Kebijakan Industri Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I	121 Laporan	
4.	Consulting Dan Pengawasan Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I	1 Laporan	
5.	Anggaran Satuan Kerja Inspektorat I	1 Laporan	
6.	Evaluasi Kegiatan Inspektorat I	1 Laporan	

Dalam melaksanakan program/kegiatan tersebut Inspektorat I pada tahun 2021 memiliki anggaran sebesar Rp 2.000.000.000,- namun pada bulan Maret 2021 mengalami pemotogan anggaran penyediaan

masker, sehingga anggaran yang tersedia menjadi **Rp 1.880.000.000,-** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. Alokasi Anggaran Inspektorat I Tahun 2021

KODE	Uraian Program / Kegiatan / Output / Jenis Belanja	VOLUME	JUMLAH (Rp,-)
1841	<b>Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, Dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat I</b>		<b>1.880.000.000</b>
1841.TAK	<b>Layanan Pengawasan Internal</b>		<b>1.880.000.000</b>
1	<b>Audit Program Prioritas Dan Program Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I</b>	4 Laporan	<b>1.054.753.000</b>
52	<b><i>Audit Program Dan Kegiatan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri</i></b>		<b>1.013.953.000</b>
A	Koordinasi Audit Kinerja Program Pengembangan Sdm Industri		30.000.000
B	Pelaksanaan Audit Kinerja Program Pengembangan Sdm Industri		983.953.000
53	<b><i>Audit Khusus</i></b>		<b>26.200.000</b>
A	Koordinasi Dan Pelaksanaan Audit Dengan Tujuan Tertentu		26.200.000
54	<b><i>Tindak Lanjut Hasil Laporan Pemeriksaan</i></b>		<b>14.600.000</b>
A	Koordinasi Dan Pelaksanaan Pendampingan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Audit		14.600.000
2	<b>Reviu Laporan Keuangan/bmn Dan Penganggaran Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I</b>	121 Laporan	<b>291.772.000</b>
51	<b><i>Reviu Lk-bmn Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I</i></b>		<b>232.572.000</b>
A	Koordinasi Pelaporan Keuangan Dan Bmn		32.000.000
B	Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan/bmn		183.292.000
C	Pelaksanaan Reviu Pengendalian Internal Atas Pelaporan Keuangan		17.280.000
52	<b><i>Reviu Rka-kl Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I</i></b>		<b>42.000.000</b>
A	Koordinasi Dan Pelaksanaan Reviu Rkaki		42.000.000
53	<b><i>Reviu Rk-bmn Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I</i></b>		<b>17.200.000</b>
A	Koordinasi Dan Pelaksanaan Reviu Rkbmn		17.200.000
3	<b>Monitoring Dan Evaluasi Tata Kelola Dan Kebijakan Industri Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I</b>	1 Laporan	<b>44.000.000</b>

<b>51</b>	<b>Monitoring Dan Evaluasi Sakip Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I</b>		<b>44.000.000</b>
A	Koordinasi Dan Pelaksanaan Penilaian Implementasi Sakip		44.000.000
<b>4</b>	<b>Consulting Dan Pengawasan Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I</b>	1 Laporan	<b>447.777.000</b>
<b>51</b>	<b>Konsultasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I</b>		<b>447.777.000</b>
A	Koordinasi Konsultasi Dan Pendampingan Pelaksanaan Manajemen Risiko Dan Kegiatan Berisiko Tinggi		10.000.000
B	Konsultansi Kegiatan Berisiko Tinggi		92.352.000
C	Pembinaan Pengawasan Oleh Pimpinan		77.550.000
D	Pendampingan Implementasi Manajemen Risiko		138.309.000
E	Koordinasi Peran Pengawasan Lainnya Cakupan Tugas Inspektorat I		129.566.000
<b>5</b>	<b>Anggaran Satuan Kerja Inspektorat I</b>	1 Laporan	<b>32.298.000</b>
<b>51</b>	<b>Penyusunan Program Kerja Dan Anggaran</b>		<b>32.298.000</b>
A	Koordinasi Penyusunan Dokumen Program Kerja Pengawasan Tahunan (pkpt) Inspektorat I		24.898.000
B	Penyusunan Anggaran Inspektorat I Tahun 2021		7.400.000
<b>6</b>	<b>Evaluasi Kegiatan Inspektorat I</b>	1 Laporan	<b>9.400.000</b>
<b>51</b>	<b>Penyusunan Dokumen Evaluasi Dan Akuntabilitas</b>		<b>9.400.000</b>
A	Pembahasan Rencana Aksi Hasil Evaluasi Lainnya		2.000.000
B	Koordinasi Dan Penyusunan Lakip Inspektorat I		7.400.000
<b>TOTAL</b>			<b>1.880.000.000</b>

## B. Sasaran dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Sasaran Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja Inspektorat I yang dilaksanakan pada tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 3. Sasaran dan Indikator Kinerja Inspektorat I dalam Perjanjian Kinerja

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Jenis Indikator	Target
<b>PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN</b>				
1.	Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	Batas toleransi temuan material pengawasan pada satuan kerja cakupan tugas Inspektorat I	<b>IKU</b>	1,4%
		Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti sesuai cakupan tugas Inspektorat I	IK	8%
		Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	IK	85%
		Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh Satker cakupan tugas Inspektorat	<b>IKU</b>	91%
2.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Indeks penerapan Manajemen Risiko satker cakupan tugas Inspektorat I	<b>IKU</b>	91,5%
<b>PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL</b>				
3.	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan	IK	75%
		Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)	IK	76%
<b>PERSPEKTIF KELEMBAGAAN</b>				
4.	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT	IK	70%
		Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	IK	80%

TABEL PERHITUNGAN													
PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN													
1.	Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	Batas toleransi temuan material pengawasan pada satuan kerja cakupan tugas Inspektorat I	<b>IKU</b>	1,4%									
		<p><b>Jumlah temuan BPK atas laporan keuangan satuan kerja cakupan tugas Inspektorat I yang bernilai uang dengan ketentuan jumlah temuan bernilai uang memiliki jumlah kurang &lt;1,4% dari satu koma empat persen.</b></p> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 10px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p style="text-align: center;"><math>x \leq 1,4\%</math></p> <p>dimana</p> <math display="block">x = \frac{\Delta mt}{\Delta aa}</math> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="text-align: center;"><math>x</math></td> <td style="text-align: center;">:</td> <td>batas maksimum</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><math>\Delta mt</math></td> <td style="text-align: center;">:</td> <td>Jumlah temuan BPK atas laporan keuangan kementerian Perindustrian yang bernilai uang</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><math>\Delta aa</math></td> <td style="text-align: center;">:</td> <td>total anggaran satuan kerja cakupan tugas Inspektorat I</td> </tr> </table>			$x$	:	batas maksimum	$\Delta mt$	:	Jumlah temuan BPK atas laporan keuangan kementerian Perindustrian yang bernilai uang	$\Delta aa$	:	total anggaran satuan kerja cakupan tugas Inspektorat I
$x$	:	batas maksimum											
$\Delta mt$	:	Jumlah temuan BPK atas laporan keuangan kementerian Perindustrian yang bernilai uang											
$\Delta aa$	:	total anggaran satuan kerja cakupan tugas Inspektorat I											
		Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti sesuai cakupan tugas Inspektorat I	<b>IKU</b>	8%									
		<p><b>Jumlah rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti dibagi dengan total rekomendasi hasil pengawasan selama 1 tahun</b></p> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 10px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p style="text-align: center;"><math>x \leq 8\%</math></p> <p>dimana</p> <math display="block">x = \frac{\Delta TPTD}{\Delta R}</math> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="text-align: center;"><math>x</math></td> <td style="text-align: center;">:</td> <td>batas maksimum</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><math>\Delta TPTD</math></td> <td style="text-align: center;">:</td> <td><b>Jumlah rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><math>\Delta R</math></td> <td style="text-align: center;">:</td> <td><b>total rekomendasi hasil pengawasan selama 1 tahun</b></td> </tr> </table>			$x$	:	batas maksimum	$\Delta TPTD$	:	<b>Jumlah rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti</b>	$\Delta R$	:	<b>total rekomendasi hasil pengawasan selama 1 tahun</b>
$x$	:	batas maksimum											
$\Delta TPTD$	:	<b>Jumlah rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti</b>											
$\Delta R$	:	<b>total rekomendasi hasil pengawasan selama 1 tahun</b>											

		Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	IK	85%									
<p><b>Jumlah total pengaduan masyarakat yang masuk ke sistem dumas dan telah didistribusikan ke unit terkait dibagi jumlah total aduan yang telah masuk ke sistem dumas</b></p> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 10px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p style="text-align: center;"><math>x \geq 85\%</math></p> <p>dimana</p> <math display="block">x = \frac{\Delta AT}{\Delta AM}</math> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; text-align: center;"><math>x</math></td> <td style="width: 5%; text-align: center;">:</td> <td>batas maksimum</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><math>\Delta AT</math></td> <td style="text-align: center;">:</td> <td>Jumlah total pengaduan masyarakat yang terdistribusi</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><math>\Delta AM</math></td> <td style="text-align: center;">:</td> <td>Jumlah total total aduan yang masuk dalam sistem</td> </tr> </table>					$x$	:	batas maksimum	$\Delta AT$	:	Jumlah total pengaduan masyarakat yang terdistribusi	$\Delta AM$	:	Jumlah total total aduan yang masuk dalam sistem
$x$	:	batas maksimum											
$\Delta AT$	:	Jumlah total pengaduan masyarakat yang terdistribusi											
$\Delta AM$	:	Jumlah total total aduan yang masuk dalam sistem											
		Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh Satker cakupan tugas Inspektorat	IKU	91%									
<p><b>Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal yang telah ditindaklanjuti dengan status Sesuai dengan Rekomendasi (SR) maupun Belum Sesuai Rekomendasi (BSR) sesuai dengan rencana aksi yang telah dibuat oleh satuan kerja dibagi dengan jumlah total rekomendasi</b></p> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 10px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p style="text-align: center;"><math>x \geq 91\%</math></p> <p>dimana</p> <math display="block">x = \frac{\Delta RAHP}{\Delta RHP}</math> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; text-align: center;"><math>x</math></td> <td style="width: 5%; text-align: center;">:</td> <td>batas maksimum</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><math>\Delta RAHP</math></td> <td style="text-align: center;">:</td> <td>Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal yang telah ditindaklanjuti dengan status Sesuai dengan Rekomendasi (SR) maupun Belum Sesuai Rekomendasi (BSR) sesuai dengan rencana aksi</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><math>\Delta RHP</math></td> <td style="text-align: center;">:</td> <td>total rekomendasi hasil pengawasan</td> </tr> </table>					$x$	:	batas maksimum	$\Delta RAHP$	:	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal yang telah ditindaklanjuti dengan status Sesuai dengan Rekomendasi (SR) maupun Belum Sesuai Rekomendasi (BSR) sesuai dengan rencana aksi	$\Delta RHP$	:	total rekomendasi hasil pengawasan
$x$	:	batas maksimum											
$\Delta RAHP$	:	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal yang telah ditindaklanjuti dengan status Sesuai dengan Rekomendasi (SR) maupun Belum Sesuai Rekomendasi (BSR) sesuai dengan rencana aksi											
$\Delta RHP$	:	total rekomendasi hasil pengawasan											

2.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Indeks penerapan Manajemen Risiko satker cakupan tugas Inspektorat I	IKU	91,5%									
		<p><b>Hasil penilaian Maturitas SPIP berdasarkan quality Assurance BPKP terhadap Kementerian Perindustrian</b></p> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 10px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p style="text-align: center;"><math>x \geq 91,5\%</math></p> <p style="text-align: center;">dimana</p> <math display="block">x = \frac{\Delta SMRI}{\Delta SBI}</math> </div> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;"><math>x</math></td> <td style="text-align: center;">:</td> <td>batas maksimum</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><math>\Delta SMRI</math></td> <td style="text-align: center;">:</td> <td>Jumlah satuan kerja yang memiliki nilai maturitas 3,8</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><math>\Delta SBI</math></td> <td style="text-align: center;">:</td> <td>Jumlah satuan kerja binaan yang dinilai</td> </tr> </table>			$x$	:	batas maksimum	$\Delta SMRI$	:	Jumlah satuan kerja yang memiliki nilai maturitas 3,8	$\Delta SBI$	:	Jumlah satuan kerja binaan yang dinilai
$x$	:	batas maksimum											
$\Delta SMRI$	:	Jumlah satuan kerja yang memiliki nilai maturitas 3,8											
$\Delta SBI$	:	Jumlah satuan kerja binaan yang dinilai											
<b>PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL</b>													
3.	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan	IK	75%									
		<p><b>Capaian Inspektorat I berdasarkan nilai yang didapatkan dari monitoring yang dilaksanakan oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal</b></p>											
		Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)	IK	76%									
		Menginventarisir penugasan audit yang dilakukan dengan bantuan 5 (lima) aplikasi SIMAK-BMN, SAIBA, SAS, Buku Kas Bendahara, RKA-K/L											

PERSPEKTIF KELEMBAGAAN													
4.	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT	IK	70%									
		<p>Tingkat kesesuaian dalam hal jadwal dan komposisi tim dengan yang tertuang dalam dokumen PKPT (dengan toleransi maksimal 1 s/d 4 hari)</p> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p style="text-align: center;"><math>x \geq 70\%</math></p> <p>dimana</p> <math display="block">x = \frac{\Delta RSP}{\Delta RP}</math> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 10px 0;"> <tr> <td style="text-align: center;"><math>x</math></td> <td style="text-align: center;">:</td> <td>batas maksimum</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><math>\Delta RSP</math></td> <td style="text-align: center;">:</td> <td>Jumlah Pelaksanaan pengawasan yang sesuai PKPT</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><math>\Delta RP</math></td> <td style="text-align: center;">:</td> <td>Jumlah rencana Pengawasan</td> </tr> </table>			$x$	:	batas maksimum	$\Delta RSP$	:	Jumlah Pelaksanaan pengawasan yang sesuai PKPT	$\Delta RP$	:	Jumlah rencana Pengawasan
$x$	:	batas maksimum											
$\Delta RSP$	:	Jumlah Pelaksanaan pengawasan yang sesuai PKPT											
$\Delta RP$	:	Jumlah rencana Pengawasan											
		Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	IK	80%									
		<p>Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan dengan sertifikasi JFA</p> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p style="text-align: center;"><math>x \geq 80\%</math></p> <p>dimana</p> <math display="block">x = \frac{\Delta JFA}{\Delta JP}</math> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 10px 0;"> <tr> <td style="text-align: center;"><math>x</math></td> <td style="text-align: center;">:</td> <td>batas maksimum</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><math>\Delta JFA</math></td> <td style="text-align: center;">:</td> <td>Jumlah Penugasan dengan tim yang bersertifikat</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><math>\Delta JP</math></td> <td style="text-align: center;">:</td> <td>Jumlah Penugasan pengawasan</td> </tr> </table>			$x$	:	batas maksimum	$\Delta JFA$	:	Jumlah Penugasan dengan tim yang bersertifikat	$\Delta JP$	:	Jumlah Penugasan pengawasan
$x$	:	batas maksimum											
$\Delta JFA$	:	Jumlah Penugasan dengan tim yang bersertifikat											
$\Delta JP$	:	Jumlah Penugasan pengawasan											

Sebagaimana tertuang dalam table diatas, seluruh sasaran program tersebut telah tertuang dalam perjanjian kinerja Inspektorat I Tahun 2021. Dalam rangka mencapai sasaran-sasaran tersebut dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah tertuang dalam DIPA Inspektorat I, yang dapat dilaksanakan melalui:

1. Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian  
Sasaran ini dicapai dengan melaksanakan:
  - a. Audit Internal
    - Melaksanakan audit kinerja pada lingkup BPSDMI dan Sekretariat Jenderal
    - Melaksanakan audit khusus dengan penugasan Menteri pada lingkup BPSDMI dan Sekretariat Jenderal
  - b. Reviu
    - Melaksanakan reviu LK-BMN pada lingkup BPSDMI dan Sekretariat Jenderal
    - Melaksanakan reviu pengadaan barang dan jasa dengan penugasan Menteri pada lingkup BPSDMI dan Sekretariat Jenderal
    - Melaksanakan reviu anggaran pada lingkup BPSDMI dan Sekretariat Jenderal
  - c. Monitoring
    - Melaksanakan penilaian SAKIP unit Eselon II dan UPT pada lingkup BPSDMI dan Sekretariat Jenderal
2. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik  
Sasaran ini dicapai dengan melaksanakan pendampingan implementasi manajemen resiko, sosialisasi, dan pembinaan pengawasan
3. Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif  
Sasaran ini dicapai dengan melaksanakan pengawasan sesuai dengan prosedur pengawasan;
4. Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien  
Sasaran ini dicapai dengan melaksanakan pengawasan sesuai dengan prosedur pengawasan dan menerapkan penjaminan kualitas yang memadai;

### C. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan tersebut dirinci dalam rencana aksi, dapat dilihat dengan tabel sebagai berikut:

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Jenis Indikator	Target	Tahun 2021			
					Rencana kegiatan (25%)	Rencana kegiatan (50%)	Rencana kegiatan (75%)	Rencana kegiatan (100%)
PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN								
1.	Terwujudnya Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian	Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal pada cakupan tugas Inspektorat I	IKU	1,4%	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Pembinaan Pengawasan oleh Pimpinan (Binwas Aceh-Medan, Binwas Padang, Binwas Makassar)</li> <li>• Konsultasi Kegiatan Berisiko Tinggi</li> <li>• Reviu PIPK Setjen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Pembinaan Pengawasan oleh Pimpinan (Binwas Bogor, Binwas Jakarta, Binwas Yogyakarta, Binwas Surabaya-Kendal)</li> <li>• Konsultasi Kegiatan Berisiko Tinggi</li> <li>•Koordinasi Konsultasi dan Pendampingan Pelaksanaan Manajemen Risiko &amp; Kegiatan Berisiko Tinggi</li> <li>•Koordinasi dan Pelaksanaan Penilaian Implementasi SAKIP (Penilaian SAKIP Setjen dan BPSDMI)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembinaan Pengawasan oleh Pimpinan</li> <li>• Konsultasi Kegiatan Berisiko Tinggi</li> <li>• Koordinasi Konsultasi dan Pendampingan Pelaksanaan Manajemen Risiko &amp; Kegiatan Berisiko Tinggi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Pembinaan Pengawasan oleh Pimpinan</li> <li>•Konsultasi Kegiatan Berisiko Tinggi</li> <li>• Koordinasi Konsultasi dan Pendampingan Pelaksanaan Manajemen Risiko &amp; Kegiatan Berisiko Tinggi</li> <li>•Koordinasi dan Pelaksanaan Reviu RKBMN 2023 Setjen &amp; BPSDMI)</li> <li>•Koordinasi dan Pelaksanaan Reviu RKAKL Setjen &amp; BPSDMI</li> </ul>

						<ul style="list-style-type: none"> <li>•Pelaksanaan Pelaporan Keuangan/BMN</li> <li>•Koordinasi Pelaporan Keuangan dan BMN</li> <li>•Reviu RKAKL Setjen &amp; BPSDMI</li> </ul>		
	Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti sesuai cakupan tugas Inspektorat I	IK	8%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan Audit Kinerja Program Pengembangan SDM Industri</li> <li>• Audit Setjen, SMTI Aceh, Audit PTKI Medan, BDI Medan, ATI Padang, BDI Padang, SMTI Padang, SMAK Padang, ATI Makassar, BDI Makassar, SMTI Makassar, dan SMAK Makassar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan Audit Kinerja Program Pengembangan SDM Industri (Audit STTT Bandung, SMTI Pontianak, AKA Bogor, SMAK Bogor, STMI Jakarta, SMTI Lampung, BDI Jakarta, APP Jakarta, ATK Yogyakarta, SMTI Yogyakarta, BDI Yogyakarta, Akom Solo, BDI Surabaya, Poltek Kendal, BDI Denpasar.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan Audit Kinerja Program Pengembangan SDM Industri Poltek Morowali, AKOM Bantaeng,</li> <li>• Koordinasi Audit Kinerja Program Pengembangan SDM Industri</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan Audit Kinerja Program Pengembangan SDM Industri (Audit BPSDMI)</li> <li>• Koordinasi Audit Kinerja Program Pengembangan SDM Industri</li> </ul>	
	Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	IK	85%			Koordinasi dan Pelaksanaan Audit dengan tujuan tertentu	• Koordinasi dan Pelaksanaan Audit dengan tujuan tertentu	
	Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker cakupan tugas Inspektorat I	IKU	91,5%			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi dan Pelaksanaan Pendampingan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Audit</li> <li>- Penggandaan dan penjiilidan koordinasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi dan Pelaksanaan Pendampingan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Audit</li> <li>- Penggandaan dan penjiilidan koordinasi dan pelaksanaan</li> </ul>	

							dan pelaksanaan Pendampingan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Audit - Koordinasi dan Pelaksanaan Pendampingan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Audit Dinas Dalam Kota	Pendampingan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Audit - Koordinasi dan Pelaksanaan Pendampingan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Audit Dinas Dalam Kota
2.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Indeks penerapan Manajemen Risiko (MRI) cakupan tugas Inspektorat I	IKU	LEVEL 3	Dikoordinasi oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal	Dikoordinasi oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal	Dikoordinasi oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal	Dikoordinasi oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal
<b>PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL</b>								
3.	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan	IK	75%	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Pembahasan Rencana Aksi Hasil Evaluasi Lainnya</li> <li>•Koordinasi dan Penyusunan LAKIP</li> <li>•Koordinasi Peran Pengawasan Lainnya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembahasan Rencana Aksi Hasil Evaluasi Lainnya</li> <li>• Koordinasi Peran Pengawasan Lainnya cakupan tugas Inspektorat I</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembahasan Rencana Aksi Hasil Evaluasi Lainnya</li> <li>• Koordinasi Peran Pengawasan Lainnya cakupan tugas Inspektorat I</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembahasan Rencana Aksi Hasil Evaluasi Lainnya</li> <li>• Koordinasi Peran Pengawasan Lainnya cakupan tugas Inspektorat I</li> <li>•Pelaksanaan Penelaahan Sejawat</li> </ul>

		Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)	IK	77%	Dikoordinasi oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal			
PERSPEKTIF KELEMBAGAAN								
4.	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT	IK	80%	•Koordinasi Penyusunan Dokumen PKPT	• Koordinasi Penyusunan Dokumen PKPT	• Koordinasi Penyusunan Dokumen PKPT	• Koordinasi Penyusunan Dokumen PKPT
		Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	IK	90%	Dikoordinasi oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal			

## **BAB III**

### **PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN**

#### **A. Hasil yang Telah Dicapai**

Realisasi anggaran Inspektorat I sampai dengan Triwulan II tahun 2021 sesuai **aplikasi PP39** telah mencapai 16,90% atau sebesar Rp.317.720.000,- dari target 35,12%, sedangkan realisasi fisik sebesar 26,55% dari target fisik sebesar 15,17%.

Sesuai dengan aplikasi *e-Monitoring* dan monitoring secara manual, realisasi anggaran Inspektorat I pada Triwulan II telah mencapai 30,67% atau sebesar Rp. 576.681.083,- dari target 35,12%.

Terdapat perbedaan realisasi anggaran pada aplikasi PP39 dengan aplikasi *e-Monitoring* yang disebabkan karena adanya 2 (dua) SP2D belum terbit. Sementara itu, realisasi fisik kegiatan Inspektorat I sesuai aplikasi *e-Monitoring* telah mencapai 26,55% dari target sebesar 15,17%. Hasil ini masih melebihi memenuhi target karena kegiatan yang ditargetkan dapat dilaksanakan pada Triwulan I baru terealisasikan di Triwulan II, akibat dampak pandemik wabah virus corona di seluruh Indonesia, sesuai Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 34 Tahun 2021 tanggal 30 Maret 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja ASN dalam Upaya Pencegahan Penyebab Penyebaran Covid-19 di lingkungan Instansi Pemerintah, yang berisi antara lain perpanjangan masa pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (Work From Home)..

Realisasi fisik dan keuangan untuk pelaksanaan kegiatan Inspektorat I dapat dilihat pada Tabel 5. dan Tabel 6.

Tabel 5. Realisasi Fisik dan Keuangan untuk Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat I sesuai Aplikasi PP39

Output	PAGU Anggaran	Triwulan ini			s/d Triwulan Ini			Sisa Anggaran s/d Triwulan IV		
		Fisik (%)	Keuangan (Rp,-)	%	Fisik (%)	Keuangan (Rp,-)	%	Fisik (%)	Keuangan (Rp,-)	%
TAK Layanan Pengawasan Internal	1.880.000.000	26,33	317.720.000	16,90	56,60	698.077.828	37,13	54,90	1.181.922.172	62,87

Tabel 6. Realisasi Fisik dan Keuangan untuk Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat I sesuai Aplikasi PP39

Jenis Kegiatan		PAGU Anggaran	Triwulan Ini			s/d Triwulan Ini			Sisa Anggaran s/d Triwulan IV		
			Fisik (%)	Keuangan (Rp,-)	%	Fisik (%)	Keuangan (Rp,-)	%	Fisik (%)	Keuangan (Rp,-)	%
1	Audit Program Prioritas Dan Program Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I	1.054.753.000	40	109.272.411	65,53	50,00	255.304.000	13,58	50,00	911.517.543	86,42
2	Reviu Laporan Keuangan/bmn Dan Penganggaran Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I	291.772.000	10	29.177	26,44	60,00	224.956.212	77,10	40,00	66.815.788	22,90
3	Monitoring Dan Evaluasi Tata Kelola Dan Kebijakan Industri Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I	44.000.000	80	41.998.000	33,90	80,00	41.998.000	95,45	20,00	2.002.000	4,55
4	Consulting Dan Pengawasan Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I	447.777.000	-	151.796.403	95,45	70,00	273.188.748	61,01%	30,00	174.588.252	38,99
6	Anggaran Satuan Kerja Inspektorat I	32.298.000	40	8.539.591	-	78,75	8.539.591	26,44	21,25	23.758.409	73,56
6	Evaluasi Kegiatan Inspektorat I	9.400.000	-	6.159.820	65,53	45,00	6.159.820	65,53	55,00	3.240.180	34,47
<b>Total</b>		<b>1.880.000.000</b>	<b>27,55</b>	<b>767.720.000</b>	<b>22,58</b>	<b>57,34</b>	<b>698.077.828</b>	<b>37,13</b>	<b>42,66</b>	<b>1.181.956.000</b>	<b>62,87</b>

Kegiatan yang telah dilakukan Inspektorat I pada Triwulan II Tahun Anggaran 2021 (April– Juni 2021) sebagai berikut:

1. Audit Program Prioritas dan Program Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I, kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu:
  - a. Audit Kinerja dan BMN pada PTKI Medan
  - b. Audit Kinerja dan BMN pada BDI Medan
  - c. Audit Kinerja dan BMN pada SMK-SMTI Padang
  - d. Audit Kinerja dan BMN pada BDI Padang
  - e. Audit Kinerja dan BMN pada BDI Denpasar
2. Reviu Laporan Keuangan/BMN dan Penganggaran Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I, kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu:
  - a. Reviu Usulan Revisi Anggaran BPSDMI
  - b. Reviu LK Kementerian perindustrian dengan Biro Keuangan
  - c. Reviu Data/Dokumen Struktur dan Anggaran dalam rangka
3. Monitoring dan Evaluasi Tata Kelola dan Kebijakan Industri Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I, kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu penilaian SAKIP di lingkungan UPT BPSDMI;
4. Consulting dan Pengawasan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I, kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu:
  - a. Sosialisasi penilaian MRI pada satuan kerja lingkup BPSDMI di Padang, Pontianak, Jawa Tengah, dan Pontianak;
  - b. Pemantauan pelaksanaan diklat 3 in 1
  - c. Pengawasan Progres dan Hasil Pengadaan Tanah Mesin Diklat 3in1 pada Satker Jogja
  - d. Pengawasan Progres Pembangunan Gedung PID1 4.0

## B. Analisis Capaian Kinerja

Analisis Capaian Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Inspektorat I triwulan II Tahun Anggaran 2021 yang telah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 6. Capaian Sasaran dan Indikator Kinerja Inspektorat I dalam Perjanjian Kinerja

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Jenis Indikator	Target
<b>PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN</b>				
1.	Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	Batas toleransi temuan material pengawasan pada satuan kerja cakupan tugas Inspektorat I	<b>IKU</b>	1,4%
		Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti sesuai cakupan tugas Inspektorat I	IK	8%
		Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	IK	85%
		Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh Satker cakupan tugas Inspektorat	<b>IKU</b>	91%
2.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Indeks penerapan Manajemen Risiko satker cakupan tugas Inspektorat I	<b>IKU</b>	91,5%
<b>PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL</b>				
3.	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan	IK	75%
		Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)	IK	76%
<b>PERSPEKTIF KELEMBAGAAN</b>				
4.	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT	IK	70%
		Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	IK	80%

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Jenis Indikator	Target	Realisasi	Keterangan
<b>PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN</b>						
1.	Terwujudnya Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian	Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal pada cakupan tugas Inspektorat I	IKU	1,4%	Belum dapat diukur	BPK belum selesai melakukan pemeriksaan
		Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti sesuai cakupan tugas Inspektorat I	IK	8%	Belum dapat diukur	Pelaksanaan Triwulan III, koordinasi dengan Set.Itjen
		Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	IK	85%	Belum dapat diukur	Pelaksanaan Triwulan III, koordinasi dengan Klinik Pengawasan
		Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker cakupan tugas Inspektorat I	IKU	91,5%	Belum dapat diukur	Pelaksanaan Triwulan III, koordinasi dengan Set.Itjen
2.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Indeks penerapan Manajemen Risiko (MRI) cakupan tugas Inspektorat I	IKU	LEVEL 3	Belum dapat diukur	Pelaksanaan Triwulan III, Koordinasi dengan Set.Itjen
<b>PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL</b>						
3.	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan	IK	75%	Belum dapat diukur	Reviu LK-BMN, Reviu PIPK, Audit Pusat (Set.Itjen), Consulting
		Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)	IK	77%	Belum dapat diukur	Reviu LK-BMN, Reviu PIPK, Audit Pusat (Set.Itjen), Consulting

PERSPEKTIF KELEMBAGAAN						
4.	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT	IK	80%	Belum dapat diukur	Reviu LK-BMN, Reviu PIPK, Audit Pusat (Set.Itjen), Consulting
		Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	IK	90%	Belum dapat diukur	Reviu, Audit, Consulting

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat capaian target kinerja dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat I Triwulan I Tahun 2021 sebagai berikut:

#### **A. Perspektif Pemangku Kepentingan**

1. Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian yaitu:
  - a. Indikator kinerja; Batas toleransi temuan material pengawasan pada satuan kerja cakupan tugas Inspektorat I  
Indikator ini belum dapat diukur karena sampai dengan Triwulan I BPK belum selesai melakukan pemeriksaan terhadap laporan Keuangan Kementerian Perindustrian. Hasil indikator ini dapat dilihat pada Triwulan II.
  - b. Indikator kinerja; Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti sesuai cakupan tugas Inspektorat I  
Pada indikator kinerja ini, Indikator ini belum dapat diukur, pelaksanaan direncanakan pada triwulan III.

- c. Indikator kinerja; Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti  
Indikator ini belum dapat diukur, dari data yang diperoleh Klinik Pengawasan Itjen sampai dengan akhir Maret, belum ada pengaduan berkadar pengawasan.
  - d. Indikator kinerja; Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker cakupan tugas Inspektorat I  
Indikator ini belum dapat diukur, pelaksanaan direncanakan pada triwulan II dan III.
2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik yaitu:
- a. Indikator kinerja; Indeks penerapan Manajemen Risiko (MRI) cakupan tugas Inspektorat I  
Indikator ini belum dapat diukur, pelaksanaan direncanakan pada triwulan III.

## **B. Perspektif Proses Bisnis Internal**

1. Terselenggaranya pengawasan internal yang efektif yaitu:
- a. Indikator kinerja; Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan  
Pelaksanaan pengawasan telah sesuai dengan standar seperti reuiu, audit dan consulting, capaian indikator ini sekitar 20%. Namun capaian nilai belum dapat dilihat karena belum dilakukan pengukuran oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal;
  - b. Indikator kinerja; Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)  
Indikator ini mencapai sekitar 20%, kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain Audit (Pusat), Reuiu dan Consulting telah menggunakan aplikasi SIMAK-BMN, SAIBA, SAS, Buku Kas Bendahara dan RKAKL. Namun capaian nilai belum dapat dilihat karena belum dilakukan pengukuran oleh Sekretariat Inspektorat Jendera

### **C. Perspektif Kelembagaan**

1. Terwujudnya sistem manajemen pengawasan internal yang efektif dan efisien yaitu:

a. Indikator kinerja; Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT

Pada Triwulan I, pelaksanaan pengawasan telah sesuai dengan PKPT, capaian indikator ini sebanyak 20% terdiri dari kegiatan Audit (Pusat), Reviu LK-BMN dan PIPK serta Consulting, kegiatan akan dilakukan pada triwulan berikutnya. Namun capaian nilai belum dapat dilihat karena belum dilakukan pengukuran oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal

b. Indikator kinerja; Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya

Pada indikator kinerja ini, kegiatan yang dilakukan sesuai dengan penugasan SDM dan perannya dengan capaian kinerja sebanyak 20%, kegiatan masih berlanjut pada triwulan berikutnya. Namun capaian nilai belum dapat dilihat karena belum dilakukan pengukuran oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal

#### D. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja

Sedangkan realisasi rencana aksi yang telah ditentukan pada triwulan II dapat dilihat dari Tabel sebagai berikut:

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Jenis Indikator	Target	TRIWULAN II	
					Rencana kegiatan (50%)	Realisasi Kegiatan
PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN						
1.	Terwujudnya Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian	Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal pada cakupan tugas Inspektorat I	IKU	1,4%	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Pembinaan Pengawasan oleh Pimpinan (Binwas Bogor, Binwas Jakarta, Binwas Yogyakarta, Binwas Surabaya-Kendal)</li> <li>• Konsultasi Kegiatan Berisiko Tinggi</li> <li>•Koordinasi Konsultasi dan Pendampingan Pelaksanaan Manajemen Risiko &amp; Kegiatan Berisiko Tinggi</li> <li>•Koordinasi dan Pelaksanaan Penilaian Implementasi SAKIP (Penilaian SAKIP Setjen dan BPSDMI)</li> <li>•Pelaksanaan Pelaporan Keuangan/BMN</li> <li>•Koordinasi Pelaporan Keuangan dan BMN</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penilaian SAKIP</li> <li>• Sosialisasi penilaian MRI pada satuan kerja lingkup BPSDMI di Padang, Pontianak, Jawa Tengah, dan Pontianak;</li> <li>• Pemantauan pelaksanaan diklat 3 in 1</li> <li>• Pengawasan Progres dan Hasil Pengadaan Tanah Mesin Diklat 3 in1 pada Satker Jogja</li> <li>• Pengawasan Progres Pembangunan Gedung PID1 4.0</li> </ul>

					•Reviu RKAKL Setjen & BPSDMI	
		Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti sesuai cakupan tugas Inspektorat I	IK	8%	• Pelaksanaan Audit Kinerja Program Pengembangan SDM Industri (Audit STTT Bandung, SMTI Pontianak, AKA Bogor, SMAK Bogor, STMI Jakarta, SMTI Lampung, BDI Jakarta, APP Jakarta, ATK Yogyakarta, SMTI Yogyakarta, BDI Yogyakarta, Akom Solo, BDI Surabaya, Poltek Kendal, BDI Denpasar.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Audit Kinerja dan BMN pada PTKI Medan</li> <li>• Audit Kinerja dan BMN pada BDI Medan</li> <li>• Audit Kinerja dan BMN pada SMK-SMTI Padang</li> <li>• Audit Kinerja dan BMN pada BDI Padang</li> <li>• Audit Kinerja dan BMN pada BDI Denpasar</li> </ul>
		Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	IK	85%	Triwulan III	Triwulan III
		Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker cakupan tugas Inspektorat I	IKU	91,5%	Triwulan III	Triwulan III
2.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Indeks penerapan Manajemen Risiko (MRI) cakupan tugas Inspektorat I	IKU	LEVEL 3	Dikoordinasi oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal	Dikoordinasi oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal

PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL						
3.	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan	IK	75%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembahasan Rencana Aksi Hasil Evaluasi Lainnya</li> <li>• Koordinasi Peran Pengawasan Lainnya cakupan tugas Inspektorat I</li> </ul>	• evaluasi internal
		Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)	IK	77%	Dikoordinasi oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal	Dikoordinasi oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal
PERSPEKTIF KELEMBAGAAN						
4.	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT	IK	80%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi Penyusunan Dokumen PKPT</li> </ul>	• evaluasi PKPT
		Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	IK	90%	Dikoordinasi oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal	Dikoordinasi oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal

## **E. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan**

Dalam pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat I, terdapat hambatan dan kendala sebagai berikut:

1. secara umum tidak ada kendala yang berarti namun dengan adanya pembatasan akibat dampak covid-19 biaya operasional tidak sesuai dengan rencana.
2. Terdapat biaya operasional yang belum dapat terealisasi karena menunggu revisi anggaran.
3. Terdapat pengajuan-pengajuan biaya operasional kegiatan yang belum tercatat dalam aplikasi karena pelaksanaan kegiatan mendekati cut off aplikasi.

## **F. Langkah Tindak Lanjut**

Langkah tindak lanjut atas hambatan dan kendala yang dihadapi pada triwulan III untuk meningkatkan kinerja Inspektorat I adalah melalui peningkatan kerjasama yang sinergis antara lain :

1. Berkoordinasi dengan Bagian Keuangan Sekretariat Inspektorat Jenderal sehingga realisasi anggaran di PP39 sesuai dengan realisasi anggaran sesungguhnya;
2. Akselerasi realisasi program/kegiatan di lingkungan Inspektorat I, agar terlaksana sesuai dengan perencanaan waktu yang ditetapkan pada awal tahun;
3. Koordinasi dengan semua pihak terkait melalui berbagai macam media baik *online* maupun tatap muka/langsung sehingga pelaksanaan kegiatan pengawasan tetap berjalan dengan lancar sesuai target yang diharapkan.
4. Perlu penjadwalan dan penganggaran kembali setelah situasi kondusif.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Secara umum pelaksanaan kegiatan Inspektorat I Kementerian Perindustrian selama periode Triwulan II Tahun 2021 telah berjalan baik sesuai dengan program kerja yang telah ditentukan.

Realisasi anggaran Inspektorat I sampai dengan Triwulan II tahun 2021 sesuai **aplikasi PP39** baru mencapai 37,13% atau sebesar Rp. 698.077.828,- dari target 58,55%, sedangkan realisasi fisik sebesar 57,34% dari target fisik sebesar 45,99%.

Sesuai dengan aplikasi **aplikasi PP39**, realisasi anggaran Inspektorat I pada Triwulan II adalah 16,90% atau sebesar Rp.317.720.000,- dari target 35,12%, sedangkan realisasi fisik sebesar 26,55% dari target fisik sebesar 15,17%.

Realisasi ini tidak dapat terukur secara *real time* karena terdapat perbedaan cut off data yang menimbulkan perbedaan data yang signifikan dikarenakan jadwal penginputan yang terkendala karena situasi pandemic yang memaksa bukti-bukti fisik yang harus dilampirkan dalam penginputan tertunda penyampaiannya, sehingga data yang terinput belum menunjukkan realisasi secara *real time*.

Berdasarkan perhitungan manual dari data-data yang terkumpul Realisasi anggaran Inspektorat I sampai dengan Triwulan II tahun 2021 telah mencapai 54,63% atau sebesar Rp. 1.027.044.000,- dari target 58,55%, sedangkan realisasi fisik sebesar 57,34% dari target fisik sebesar 45,99% dengan kondisi realisasi pada Triwulan II sebesar Rp. 646.720.000,- atau sebesar 34,40% dari target yang ditentukan sebesar 35,12%.

Dalam pelaksanaan kegiatan terdapat beberapa masalah dan kendala yang dihadapi, namun berkenaan dengan situasi dan kondisi pandemic pelaksanaan mengikuti kebijakan pemerintah terkait penanggulangan situasi pandemik. Upaya yang dapat dilakukan adalah menciptakan prosedur atau Langkah-langkah tertentu untuk mengatasi masalah-masalah pelaksanaan pekerjaan yang hanya bisa diselesaikan di kantor agar dapat diselesaikan kapanpun dan dimana saja.

## **B. Saran**

Kerjasama dan koordinasi sinergi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan di lingkungan Inspektorat I baik internal maupun eksternal perlu lebih ditingkatkan untuk mempertahankan kinerja yang telah dicapai dengan baik oleh Inspektorat I.

Demikian Laporan Inspektorat I periode Triwulan II Tahun 2021 untuk dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

**LAMPIRAN**  
**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN**  
**TRIWULAN – II**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**  
**INSPEKTORAT I**



**Kementerian  
Perindustrian**  
REPUBLIK INDONESIA

**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN  
INSPEKTORAT I  
( Aplikasi Form A )  
TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2021  
(Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 )**

IV. KENDALA DAN LANGKAH TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN

No	Output	Kendala	Tindak Lanjut yang Diperlukan	Pihak yang Diharapkan Dapat Membantu Penyelesaian Masalah
1	2	3	4	5
1.	TAK Layanan Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"><li>- 1. Terdapat biaya operaisonal yang belum dapat terealisasi karena menunggu revisi anggaran.</li><li>- 2. Terdapat pengajuan-pengajuan biaya operasional kegiatan yang belum tercatat dalam aplikasi karena pelaksanaan kegiatan mendekati cut off aplikasi</li></ul>		

Jakarta Selatan, Juli 2021

Inspektur I Inspektorat Jenderal



Wulan Aprilianti Permatasari, S.Kom, M.Si

## Kegiatan Inspektorat I

Monitoring Capaian

Sasaran & Indikator

No.	Indikator	Target	TW I		TW II		TW III		TW IV		Real. Fisik	Real. Keu	Capaian
			T	R	T	R	T	R	T	R			
<b>1. S1 - Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian</b>													
	S1.1 - Batas toleransi temuan material pengawasan pada satuan kerja cakupan tugas Inspektorat I *)JKU Pagu = Rp. 515.674.000	1,4 %	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	47%	58%	100 %
	S1.2 - Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti sesuai cakupan tugas Inspektorat I Pagu = Rp. 1.013.953.000	8 %	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	4%	14%	85 %
	S1.3 - Pengaduan masyarakat berkedar pengawasan yang ditindaklanjuti Pagu = Rp. 26.200.000	85 %	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100 %
	S1.4 - Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh Sektor cakupan tugas Inspektorat I *)JKU Pagu = Rp. 14.600.000	91,5 %	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100 %
<b>Total Pagu Sasaran = Rp. 1.570.427.000</b>													
<b>2. S1 - Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik</b>													
	S1.5 - Indeks penerapan Manajemen Risiko satker cakupan tugas Inspektorat I *)JKU Pagu = Rp. 138.309.000	3 level	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0 level
<b>Total Pagu Sasaran = Rp. 138.309.000</b>													
<b>3. T1 - Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif</b>													
	T1.1 - Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan Pagu = Rp. 129.566.000	75 %	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	64%	65%	0 %
	T1.2 - Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK) Pagu = Rp. 0	76 %	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0 %
<b>Total Pagu Sasaran = Rp. 129.566.000</b>													
<b>4. L1 - Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien</b>													
	L1.1 - Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT Pagu = Rp. 0	70 %	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0 %
	L1.2 - Tingkat kesesuaian perugasan SKM pengawasan sesuai dengan perannya Pagu = Rp. 0	80 %	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0 %
<b>Total Pagu Sasaran = Rp. 0</b>													
<b>Total Pagu Keseluruhan = Rp. 1.838.302.000</b>													